

Evaluasi Mekanisme Verifikasi Berjenjang dalam Menekan *Lead Time to Pay* Tagihan Vendor Sektor Ketenagalistrikan

Author; Siti Nunu Parwati

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa,
Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang,
Banten 42124

Korespondensi penulis: nunupw555@gmail.com

Abstract. *Abstract. The electricity sector depends on effective collaboration between state-owned enterprises and vendors to ensure operational continuity. A persistent challenge in this supply chain is the delay in vendor payments, frequently resulting from complex administrative procedures. This qualitative descriptive study examines the tiered verification mechanism in vendor billing administration at PT PLN Indonesia Power Services. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results indicate that, although the tiered verification process aims to ensure Good Corporate Governance (GCG) compliance, it introduces administrative bottlenecks. Principal constraints include inconsistencies in tax documentation, changes in contract schemes, and manual validation stages that extend the Lead Time to Pay. These inefficiencies create hidden transaction costs and jeopardize vendor liquidity. The study proposes the adoption of digital validation checklists and comprehensive vendor education to streamline verification layers, reduce payment lead time, and support the sustainability of the vendor ecosystem.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Lead Time to Pay, Supply Chain, Tiered Verification, Transaction Cost.*

Abstrak. Sektor ketenagalistrikan sangat bergantung pada sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra kerja (vendor) untuk menjaga kontinuitas operasional. Isu krusial dalam rantai pasok ini adalah keterlambatan pembayaran vendor yang sering dipicu oleh kerumitan prosedur administrasi. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengevaluasi mekanisme verifikasi berjenjang (tiered verification) dalam proses administrasi penagihan mitra kerja di PT PLN Indonesia Power Services. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi berjenjang, meskipun ditujukan untuk kepatuhan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), menciptakan bottleneck administrasi. Kendala utama meliputi ketidaksesuaian dokumen perpajakan, transisi skema kontrak, dan fase validasi manual yang memperpanjang Lead Time to Pay. Inefisiensi ini memunculkan biaya transaksi tersembunyi dan mengancam likuiditas vendor. Penelitian ini merekomendasikan implementasi checklist validasi digital dan edukasi vendor yang intensif untuk merampingkan lapisan verifikasi, sehingga secara signifikan dapat menekan waktu tunggu pembayaran dan menjaga keberlanjutan ekosistem mitra kerja.

Kata kunci: Biaya Transaksi, *Lead Time to Pay*, Rantai Pasok, Tata Kelola Perusahaan, Verifikasi Berjenjang.

1. LATAR BELAKANG

Dalam ekosistem bisnis modern, khususnya di sektor strategis seperti ketenagalistrikan, peran mitra kerja atau vendor sangat penting dalam mendukung keandalan operasional perusahaan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, seperti PT PLN Indonesia Power Services, diwajibkan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di seluruh lini bisnis, termasuk dalam proses pengadaan dan pembayaran kepada mitra kerja. Salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola rantai pasok (*supply*

Received: Februari 04, 2026; Revised: Februari 11, 2026; Accepted: Februari 18, 2026;

Online Available: Maret 01, 2026; Published: Februari 28, 2026;

chain) adalah ketepatan waktu pembayaran atau *Lead Time to Pay* (LTTP). Bagi mitra kerja, kelancaran pembayaran tagihan merupakan faktor kunci yang menentukan likuiditas dan keberlangsungan arus kas operasional.

Namun, data empiris menunjukkan bahwa upaya menjaga kepatuhan administratif sering kali bertentangan dengan efisiensi waktu. Terdapat perbedaan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) ideal pencairan dana dan praktik di lapangan. Observasi awal mengindikasikan bahwa proses pencairan tagihan vendor sering mengalami penundaan signifikan akibat birokrasi yang panjang dan mekanisme verifikasi berjenjang. Proses administrasi penagihan mengharuskan dokumen melewati beberapa tahap pengecekan, mulai dari verifikasi kelengkapan dasar, validasi faktur perpajakan, pengecekan laporan teknis pekerjaan, hingga otorisasi akhir oleh pejabat berwenang. Kesalahan kecil pada salah satu tahap verifikasi, seperti ketidaksesuaian nominal pajak atau format berita acara, menyebabkan dokumen dikembalikan ke vendor dan mengulang estimasi waktu pencairan.

Penelitian sebelumnya mengenai *procure-to-pay* umumnya berfokus pada analisis kuantitatif rasio keuangan dan dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan utama. Literatur yang membahas akar masalah administratif dari perspektif kualitatif, khususnya evaluasi kritis terhadap lapisan verifikasi, masih terbatas. Dengan mempertimbangkan dinamika seperti perubahan skema kontrak operasional, misalnya dari Lumpsum ke *Cost Structure* yang meningkatkan kompleksitas persyaratan dokumen, diperlukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme verifikasi berjenjang dalam proses penagihan mitra kerja, mengidentifikasi titik-titik bottleneck, dan merumuskan strategi untuk menekan Lead Time to Pay tanpa mengorbankan prinsip kepatuhan tata kelola.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Economics*), yang dipelopori oleh Coase dan dikembangkan oleh Williamson (1981), menyatakan bahwa setiap transaksi pertukaran ekonomi mengandung biaya yang tidak hanya terbatas pada harga barang/jasa, melainkan juga biaya pencarian informasi, negosiasi, dan penegakan kontrak. Dalam konteks penagihan vendor, waktu tunggu, proses bolak-balik revisi dokumen, serta beban staf administrasi merupakan bentuk nyata dari biaya transaksi tersembunyi. Semakin panjang jenjang verifikasi, semakin tinggi asimetri informasi antara vendor dan perusahaan, yang bermuara pada inefisiensi ekonomi. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) memang menuntut kehati-hatian, namun prosedur verifikasi berjenjang yang terlampau kaku dapat memicu inefisiensi. Pendekatan ekonomi institusional menegaskan bahwa solusi kontraktual dan

verifikasi yang kaku, tanpa mempertimbangkan kapasitas manajerial institusi dan vendor di lapangan, justru akan gagal mencapai tujuan efisiensi dan memperbesar biaya transaksi tersembunyi (Canitez & Çelebi, 2018).

Lead Time to Pay dan Stabilitas Likuiditas, merujuk pada rentang waktu antara penyerahan dokumen penagihan yang dinyatakan lengkap hingga dana efektif diterima di rekening mitra kerja. Manajemen likuiditas sangat sensitif terhadap durasi ini. Keterlambatan pembayaran dalam rantai pasok tidak sekadar menjadi isu administratif birokrasi, tetapi secara langsung mendisrupsi manajemen modal kerja mitra bisnis. Perpanjangan waktu tunggu pencairan dana memaksa vendor menanggung beban finansial tak terduga yang dapat menggerus profitabilitas serta menghambat kemampuan mereka dalam mengeksekusi operasional proyek selanjutnya (Huang, Chan, & Chung, 2022).

Prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam BUMN mewajibkan adanya pemisahan fungsi dan kontrol berlapis (Ramdhani, 2018). Verifikasi berjenjang didesain untuk mencegah fraud, memastikan perhitungan pajak yang akurat, dan menjamin bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak. Namun, jika tidak didukung oleh kapabilitas sumber daya dan sistem informasi yang terintegrasi, mekanisme ini rentan berubah menjadi patologi birokrasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam terkait proses, makna, dan interaksi antar subjek dalam alur penagihan, yang tidak dapat sekadar diukur dengan angka matematis.

Fokus penelitian dilakukan pada divisi yang menangani administrasi penagihan mitra unit kerja. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari: (1) Staf Administrasi Penagihan sebagai pelaksana lapis pertama, (2) Supervisor Keuangan yang bertindak sebagai otorisator, dan (3) Perwakilan Mitra Kerja yang menjadi pihak terdampak.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

- 1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Menggali persepsi dan kendala langsung dari pelaku proses.
- 2) Observasi Partisipatif: Mengamati secara langsung dinamika penyerahan dokumen, proses pengecekan silang, hingga penanganan kendala teknis (seperti antrean tanda tangan dan manajemen pengarsipan dokumen berbasis digital dan fisik).

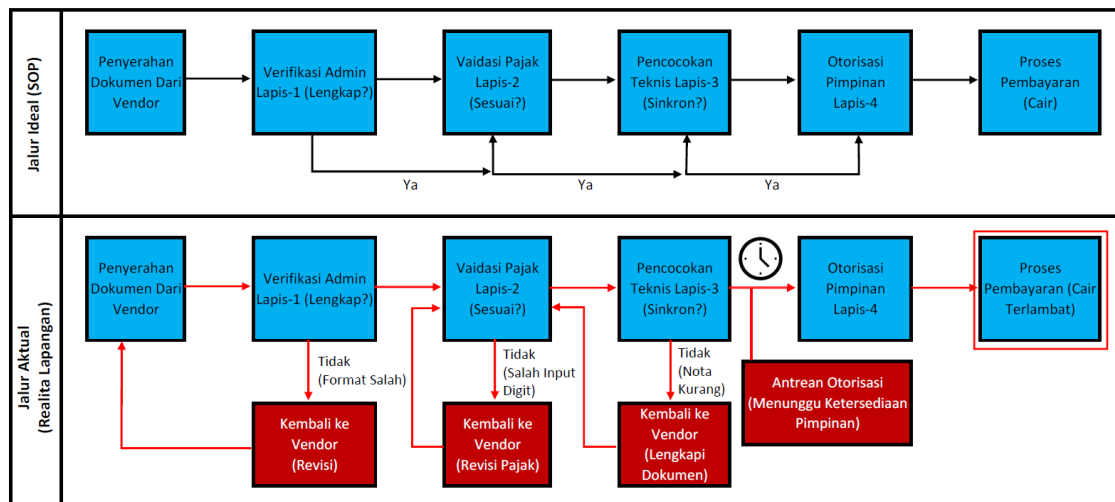
- 3) Studi Dokumen: Menganalisis SOP perusahaan, daftar periksa (*checklist*) kelengkapan dokumen, serta rekapitulasi pengembalian berkas (*return log*).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka kerja interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga alur kegiatan secara bersamaan: reduksi data (pemilahan hasil observasi dan transkrip wawancara ke dalam tema sentral), penyajian data (pemetaan alur verifikasi dalam bentuk naratif dan visual), dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk memastikan keabsahan dan objektivitas data penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Alur Verifikasi Berjenjang (*Actual Flow*)

Berdasarkan observasi partisipatif dan penelusuran dokumen SOP di PT PLN Indonesia Power Services, alur penagihan secara teoretis dirancang linear dan efisien untuk mempercepat *Lead Time to Pay*. Namun, realita di lapangan menunjukkan friksi administratif yang menciptakan kesenjangan antara prosedur ideal dan praktik aktual. Kesenjangan alur verifikasi ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Alur Verifikasi Ideal (SOP) dan Realita Lapangan

Sumber: Olahan Data Peneliti (2026)

Merujuk pada Gambar 1, dapat dianalisis bahwa proses yang seharusnya berjalan lurus terdistorsi menjadi siklus *looping*. *Bottleneck* atau penyumbatan alur kerja terjadi pada tiga titik krusial: verifikasi kelengkapan dasar, validasi perpajakan, dan pencocokan laporan teknis. Ketika dokumen di salah satu titik ini dinyatakan tidak valid, berkas tidak serta-merta diperbaiki di tempat, melainkan dikembalikan sepenuhnya (*return*) kepada vendor. Siklus perulangan inilah yang memicu *rework* (kerja ulang) bagi staf administrasi dan secara

eksponensial menambah durasi tunggu pencairan dana. Di samping itu, pada lapis otorisasi akhir, dokumen kerap tertahan di meja pimpinan akibat mobilitas supervisor yang tinggi, yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada tanda tangan basah (fisik) menjadi titik kelemahan tambahan dalam tata kelola rantai pasok ini.

Identifikasi Bottleneck dan Biaya Transaksi Tersembunyi

Penelitian menemukan bahwa inefisiensi atau *bottleneck* jarang terjadi karena ketiadaan dana, melainkan murni karena friksi administratif. Beberapa temuan kunci di lapangan meliputi:

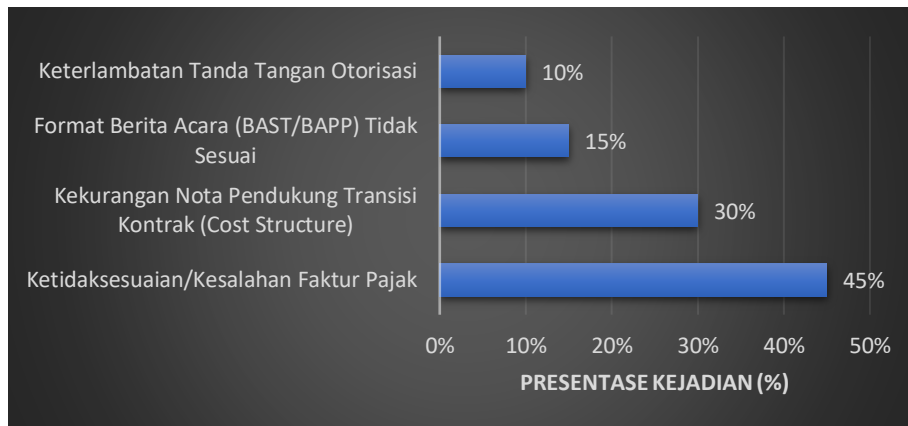
1. Redundansi Pengecekan Perpajakan

Terdapat ketidaksinkronan pemahaman antara vendor dan tim verifikator mengenai regulasi pajak terbaru atau kode faktur. Seringkali, dokumen harus dikembalikan hanya karena kesalahan input satu digit angka pajak. Inefisiensi waktu dalam pencairan tagihan tidak selalu berakar pada ketiadaan dana perusahaan. Proses rework atau pengembalian dokumen seringkali bersumber dari kelalaian mitra kerja itu sendiri. Studi pada berbagai proyek ketenagalistrikan dan infrastruktur di Indonesia membuktikan bahwa ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen tagihan (*invoice*) dari pihak kontraktor/vendor menjadi salah satu faktor determinan tertinggi yang menyebabkan tertahannya termin pembayaran oleh pihak pemberi kerja (Hatmoko, *et. al.*, 2022). Hal ini menuntut adanya edukasi berkelanjutan dari perusahaan kepada vendor.

2. Transisi Skema Kontrak

Perubahan klausul kerjasama, misalnya dari sistem Lumpsum yang sederhana menjadi Cost Structure yang menuntut rincian nota pengeluaran riil, menimbulkan kebingungan di pihak vendor. Mereka sering kali menyertakan dokumen pendukung yang tidak relevan atau kurang lengkap saat di tahap verifikasi teknis. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan B selaku Supervisor Senior Jasa Operasi & Pemeliharaan Alat Penunjang. Beliau menegaskan bahwa urgensi pencairan dana sering terhambat oleh inakurasi dokumen fisik: "Seringkali saat dokumen sampai di meja saya, rincian Berita Acara Serah Terima tidak sinkron dengan realisasi fisik. Apalagi semenjak ada transisi skema kontrak yang lebih detail, kami dituntut mengecek rincian biaya secara rigid. Kalau bukti pendukungnya tidak lengkap, terpaksa dokumen saya 'return' kembali ke admin depan." (Wawancara, 2026).

Untuk membedah lebih dalam mengenai faktor utama yang memicu siklus *looping* pada alur verifikasi tersebut, penelitian ini mengkuantifikasi catatan logbook harian pengembalian dokumen. Frekuensi dan distribusi penyebab utama retur dokumen tagihan mitra kerja divisualisasikan pada Gambar 2.



Sumber: Olahan Data Logbook Harian Peneliti (2026)

Gambar 2. Distribusi Presentase Penyebab Utama Retur Dokumen Tagihan Vendor

Berdasarkan data pada Gambar 2, terlihat jelas bahwa inefisiensi administrasi didominasi oleh kendala teknis dari sisi mitra kerja, bukan dari ketiadaan dana perusahaan. Ketidaksesuaian atau kesalahan input faktur pajak menempati urutan tertinggi sebesar 45%. Hal ini mengindikasikan adanya asimetri informasi yang cukup parah antara regulasi perpajakan perusahaan dengan pemahaman vendor.

Faktor terbesar kedua (30%) disumbang oleh kekurangan nota pendukung akibat transisi skema kontrak, misalnya dari skema Lumpsum beralih ke Cost Structure. Vendor sering kali gagap beradaptasi dengan tuntutan kelengkapan dokumen yang lebih presisi. Selanjutnya, format Berita Acara (BAST/BAPP) yang tidak sinkron menyumbang 15%, dan keterlambatan otorisasi internal menyumbang 10%.

Dalam perspektif ekonomi institusional, tingginya persentase kesalahan di tahap pajak dan kontrak ini bukan sekadar masalah "kertas kerja", melainkan manifestasi nyata dari tingginya biaya transaksi tersembunyi. Waktu dan tenaga yang dihabiskan vendor untuk bolak-balik merevisi dokumen—serta *man-hour* staf admin yang terbuang untuk menyortir kesalahan berulang—merupakan inefisiensi ekonomi yang menggerus profitabilitas mitra kerja dan berisiko mengganggu stabilitas likuiditas mereka dalam menjalankan proyek operasional kelistrikan selanjutnya.

3. Kendala Teknis dan Antrean Otorisasi

Kendala lapangan tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga teknis. Proses digitalisasi (seperti pemindaian dokumen per batch) kadang terhambat oleh masalah perangkat, dan tahapan krusial sering terhenti menunggu ketersediaan waktu pimpinan untuk menandatangani lembar pengesahan, mengingat tingginya mobilitas supervisor.

Kondisi di atas menciptakan pengulangan pekerjaan (*rework*). Dalam kacamata Teori Biaya Transaksi, *rework* ini adalah kerugian. Waktu yang seharusnya digunakan staf untuk

mengurus ribuan tagihan lain tersita untuk mengedukasi satu per satu vendor yang melakukan kesalahan repetitif.

Dampak pada *Lead Time to Pay* dan Likuiditas Vendor

Mekanisme verifikasi berjenjang yang lamban berimplikasi langsung pada membengkaknya *Lead Time to Pay*. SOP yang idealnya menjanjikan pencairan dalam 14 hingga 30 hari kerja dapat mundur menjadi 45 hingga 60 hari kerja jika dokumen mengalami retur lebih dari dua kali. Wawancara dengan perwakilan mitra kerja mengungkap bahwa mundurnya jadwal pembayaran mengganggu cash flow mereka, menghambat pembayaran gaji pekerja lapangan vendor, dan menurunkan tingkat kepercayaan antara mitra kerja dengan instansi.

Optimalisasi Proses: Menyederhanakan Tanpa Melanggar Kepatuhan

Penyederhanaan tiered verification tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol. Pembahasan menyoroiti bahwa masalah utamanya adalah asimetri informasi di awal proses. Evaluasi ini menekankan perlunya pergeseran paradigma dari "Verifikasi Pasif" menjadi "Mitigasi Aktif". Hal ini dapat dicapai melalui digitalisasi checklist pra-penyerahan dokumen, di mana vendor tidak dapat memproses serah terima fisik sebelum sistem otomasi menyatakan elemen dasar telah sesuai. Selain itu, pendelegasian wewenang otorisasi digital pada batas nominal tertentu dapat mengurai antrean panjang di meja pimpinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme verifikasi berjenjang dalam alur administrasi penagihan di sektor ketenagalistrikan merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, ia esensial untuk menjaga akuntabilitas dan GCG; di sisi lain, pelaksanaannya di lapangan menciptakan *bottleneck* yang memperpanjang *Lead Time to Pay*. Akar permasalahan bukan pada itikad para pihak, melainkan pada asimetri informasi terkait kompleksitas dokumen (terutama pajak dan transisi kontrak), serta tingginya ketergantungan pada pengecekan manual dan antrean otorisasi.

Keterlambatan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan isu ekonomi yang menciptakan biaya transaksi inefisien dan mengancam stabilitas likuiditas mitra kerja. Sebagai implikasi manajerial, perusahaan disarankan memperkuat edukasi vendor secara proaktif dan mengintegrasikan sistem pre-screening digital. Dengan demikian, kualitas dokumen yang masuk ke meja verifikator sudah matang, memangkas proses revisi bolak-balik, dan pada akhirnya mempercepat perputaran roda ekonomi rantai pasok.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kualitatif di satu unit kerja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model kuantitatif yang mengukur korelasi eksak antara waktu verifikasi dokumen dengan biaya modal (*cost of capital*) yang harus ditanggung vendor selama masa tunggu.

DAFTAR REFERENSI

- Canitez, F., & Celebi, D. (2018). Transaction cost economics of procurement models in public transport: An institutional perspective. *Research in Transportation Economics*, 69(C), 116-125. doi: <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2018.03.002>
- Huang, C., Chan, F. T., & Chung, S. H. (2022). The impact of payment term extensions on the working capital management of an automotive supply chain. *International Journal of Production Research*, 60(24), 7360-7383. doi: <https://doi.org/10.1080/00207543.2022.2065549>
- Hatmoko, J. U. D., Hidayat, A., Zachari, M., & Merukh, S. S. H. (2022). Investigasi Pengaruh Keterlambatan Pembayaran Proyek Konstruksi dari Owner kepada Kontraktor. *TEKNIK*, 43(2), 168-177. doi: [10.14710/teknik.v43i2.45876](https://doi.org/10.14710/teknik.v43i2.45876)